

Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo - LKE KEMENPANRB

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.3	2.3	.Masih terdapat penetapan target yang belum masuk kategori minimal 'Baik' sesuai dengan KepmenPANRB No. 182 Tahun 2024..Rencana Aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.Indikator Output atas Rencana Aksi sudah relevan, namun belum cukup menggambarkan Sasaran yang ingin diwujudkan.Penetapan target atas Output belum sepenuhnya didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.Rencana Aksi belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai	.Memastikan bahwa target yang ditetapkan masuk dalam kategori minimal 'Baik' sesuai dengan KepmenPANRB No. 182 Tahun 2024..Memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama.Memastikan seluruh indikator Output atas Rencana Aksi cukup menggambarkan Sasaran.Melakukan reviu agar target atas Output didasarkan pada target Sasaran Kegiatan Utama.Melakukan reviu agar Rencana Aksi didukung dengan anggaran yang memadai dan memperhatikan efektifitas serta efisiensi
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	99	5.31		
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	2	1.2		Segera melakukan penetapan pengaturan mengenai sistem kerja pasca dilakukan penyederhanaan birokrasi
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas SPIP	4	3.01	2.4	1. Belum terlihat cross cutting Sasaran 2. Indikator tidak cukup untuk menggambarkan sasaran 3. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu 4. Pengendalian yang ada belum diarahkan untuk memitigasi risiko/pencapaian tujuan 5. Risiko kemitraan belum dikelola 6. Sistem antikorupsi yang dibangun belum memadai	1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome. memenuhi kriteria SMART. dan didukung target yang tepat 2. Menetapkan target dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya sesuai yang diatur dalam pedoman 3. Melakukan proses manajemen risiko yang melekat pada proses perencanaan agar pengendalian yang disusun mampu memitigasi risiko 4. Menyusun risk register dengan memperhatikan risiko kemitraan yang mungkin muncul 5. Menyusun SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
								prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi. yakni cegah. deteksi. dan respons
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.5	0.5	0.5		
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP	4	70.2	2.81	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	90.45	2.26	Penjelasan catatan tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi	Penjelasan rekomendasi tingkat digitalisasi arsip dapat dikonfirmasi ke Lembaga Kearsipan Daerah provinsi
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	2	1	rata-rata waktu respon masih lama, beberapa tidak lanjut belum substantif	Perlu mempercepat tindaklanjut, memperbaiki kualitas tindaklanjut
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	20.21	0.51	1. Prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik belum terbukti dilakukan pada seluruh proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan publik yang dimiliki; 2. Penilaian mandiri IKK belum tuntas pada seluruh sampel kebijakan yang diukur dalam IKK; dan 3. Pengungkapan bukti dukung masih sangat kurang.	1. Memperkuat dukungan pimpinan terkait pengelolaan kualitas kebijakan dan meningkatkan konsolidasi antar unit kerja untuk menggali data dan informasi tata kelola kebijakan yang dimiliki. 2. Menyelesaikan proses penilaian mandiri pada seluruh sampel kebijakan. 3. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kebijakan yang baik pada seluruh proses kebijakan yang dilakukan. 4. Melibatkan secara aktif SDM fungsional Analisis Kebijakan/pejabat fungsional terkait lainnya yang kompeten untuk melakukan analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan di seluruh proses kebijakan.
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum	2.5	98.34	2.46	Kategori AA (Istimewa)	Dipertahankan dan ditingkatkan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Reformasi Birokrasi						
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.4	1.2	• Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum menerapkan Prinsip SDI sesuai dengan aturan atau kaidah yang baku. Masing-masing produsen data menerapkan Prinsip SDI dengan standarnya masing-masing. • Penerapan Aspek Relevansi terkait relevansi data terhadap pengguna data serta Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu sudah dilakukan oleh produsen data, namun masih dengan standarnya masing-masing. • Produsen data sudah menerapkan aspek pemeriksaan dan penyebarluasan data, namun menurut standarnya masing-masing. • Penerapan Aspek Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik serta penjaminan netralitas dan obyektivitas terhadap penggunaan sumber data belum didukung oleh aturan atau kaidah baku yang menjelaskan secara detail. • Indikator sosialisasi dan literasi data statistik sudah dilakukan oleh produsen data, namun dengan standarnya masing-masing. Pada Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Ponorogo belum membahas aturan atau kaidah baku mengenai sosialisasi dan literasi data statistik.	• Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menerapkan Prinsip SDI sesuai dengan aturan atau kaidah baku terkait Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas dan Kode Referensi. Aturan atau kaidah baku perlu dibuat lebih detail untuk menjelaskan penerapan indikator yang dimaksud dan berlaku untuk seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. • Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melengkapi aturan atau kaidah baku yang lebih detail mengenai relevansi data terhadap pengguna data, aktualitas dan ketepatan waktu. • Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu melengkapi proses pemeriksaan data sesuai dengan aturan atau kaidah baku terkait pengolahan data dan analisis data. • Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu menyusun aturan baku yang lebih detail terkait Aspek Profesionalitas dan diterapkan oleh seluruh produsen data. • Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu membuat aturan kaidah baku mengenai penerapan indikator sosialisasi dan literasi statistik.
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	69.62	1.74	1) Pengumuman RUP di atas 70%; 2) Realisasi e-Tendering di atas 70%; 3) Paket selesai katalog elektronik di atas 70%; 4) Tidak ada transaksi Toko Daring; 5) Realisasi non e-Tendering/non e-Purchasing di bawah 50%; 6) Pencatatan e-Kontrak di bawah 20%; 7) Keterisian JF PPBJ masih jauh dari 100% dan belum mencapai 60%; 8) Level Kematangan	1) Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP; 2) Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender; 3) Tingkatkan dan pertahankan kinerja penyelesaian paket katalog elektronik; 4) Realisasikan minimal 1 paket melalui toko daring; 5) Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP; 6) Tingkatkan dan

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							belum mencapai Level 3 (Proaktif).	pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak;7) Melakukan penghitungan ulang kebutuhan JF PPBJ untuk memastikan formasi JF PPBJ sesuai kebutuhan; 8) Segera akselerasi pemenuhan bukti dukung untuk mencapai kematangan Level 3 (Proaktif) secara internal atau melalui koordinasi dengan LKPP
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Sistem Merit	4	252	2.46	2023	
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	2	4.32	1.73		
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2	87.88	1.76		Melaksanakan saran dalam surat ketua Ombudsman yang telah disampaikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
16	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks SPBE	9	3.07	5.53	Predikat Baik	Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi
17	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Makro	4	95.21	3.81	Merupakan capaian IKU Makro yang terdiri dari Tingkat Penganggutan Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini	
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Capaian IKU Non Makro	6	83.33	3.51	Masih terdapat Indikator Kinerja Utama (Non Makro) yang belum berhasil memperoleh capaian kinerja lebih dari 90% (>90%) dari target yang diperjanjikan.	Mengawal ketercapaian seluruh indikator kinerja agar tercapai sesuai dengan target yang telah diperjanjikan
19	RB General	Capaian	Opini BPK	5	3	5	WTP	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
		Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi						
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	88.04	3.52		
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Indeks BerAkhlak	4	71.33	2.85	Kategori Cukup Sehat	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan username dan password yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Penilaian Integritas	10	73.43	7.34	Internal: 76.55; Eksternal: 89.09; Eksper: 74.7	Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Pada SPI 2024, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendapat skor SPI sebesar 73.43. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam kategori waspada, yang berarti praktik korupsi masih terjadi berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal maupun eksper. Situasi ini bisa terjadi akibat dari sistem pencegahan antikorupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level Integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan antikorupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi lembaga yang bersifat kontekstual serta

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
								strategi mitigasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, ada beberapa rekomendasi langkah dan tahapan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	Survei Kepuasan Masyarakat	8	88.68	7.09		Pertahankan Pelaksanaan SKM, Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
24	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	1	0.57	0.57	1. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 3. Capaian output rencana aksi belum 100%	1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 3. Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun terlaksana seluruhnya dengan baik dan sesuai.
25	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1	0.88	0.88	1. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Capaian output rencana aksi belum 100%	1. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 2. Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun terlaksana seluruhnya dengan baik dan sesuai.
26	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1	0.49	0.49	1. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Rencana Aksi dengan Indikator Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran keberhasilan yang ditentukan 3. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi,	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah 3. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 4. Menyempurnakan Rencana aksi yang

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
							dan inovasi 4. Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 5. Capaian output rencana aksi belum 100%	menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain 5. Memastikan Rencana aksi tematik yang disusun terlaksana seluruhnya dengan baik dan sesuai.
27	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1	1	1		
28	RB Tematik	Strategi Pembangunan	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1	0.54	0.54	1. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 3. Rencana aksi belum menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain	1. Memastikan seluruh indikator memenuhi kriteria SMART dan Cukup 2. Memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi 3. Menyempurnakan Rencana aksi yang menunjukkan kolaborasi nyata dengan unsur pentahelix lain
29	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	0.87	0.87	Angka Kemiskinan yang Digunakan Angka Maret Tahun 2024, sumber data BPS	
30	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.42	1.42	Data Realisasi Investasi Menggunakan Data Per Desember 2024	
31	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	0.38	0.38	Menggunakan Data Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Berdasarkan Surat Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Nomor OT.04.03/ A.IV/1483/2025 Tanggal 5 Februari 2025	
32	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	1.35	1.35	Perhitungan Capaian Dampak PDN Mengacu pada KepmenPANRB 182 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2370	

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi
33	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	0	0	Berdasarkan Penilaian Kinerja Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri dengan Menggunakan Data Tahun 2023 dan 2024, predikat penilaian kinerja pengendalian inflasi berada pada kriteria Belum Baik	
34	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	0	0	Instansi belum melakukan penyusunan Arsitektur SPBE sesuai standar	Instansi perlu menyusun Arsitektur As-Is